

# Penyuluhan Perikanan dengan Perspektif Gender di Wilayah Pesisir Jawa Tengah

## *Fisheries Extension with Gender Roles in Central Java's Coastal Area*

\*Retno Widiastuti<sup>1,2</sup>, Anna Fatchiya<sup>1</sup>, Pudji Mujono<sup>1</sup> dan Syahyuti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (IPB) University Gedung FEMA IPB, Jalan Kamper, Kampus IPB Darmaga, Bogor, Indonesia

<sup>2</sup>Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Badan Riset Inovasi Nasional Jl. Gatot Subroto No. 10, Jakarta Pusat, Indonesia

<sup>3</sup>Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan, Badan Riset Inovasi Nasional Gedung Sasana Widya Sarwono Lantai 6, Jl. Gatot Subroto No.10, Jakarta Selatan., Indonesia

### ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 11 Juni 2025  
Perbaikan naskah: 25 September 2025  
Disetujui terbit : 20 Oktober 2025

Korespondensi penulis:  
Email: retn032@brin.go.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/marina.v11i2.15367>



### ABSTRAK

Permasalahan pada sektor perikanan tangkap, budi daya, serta pengolahan dan pemasaran skala kecil menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam proses pembangunan masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini menyebabkan perlu adanya suatu proses untuk meningkatkan kemampuan individu yang terlibat dalam perikanan melalui program penyuluhan perikanan yang mempertimbangkan aspek holistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyuluhan perikanan pesisir dari perspektif gender dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan survey eksplanasi yang mengumpulkan data survei dan wawancara terhadap 291 pelaku perikanan skala kecil yang terdiri dari nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar di Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Cilacap. Analisis data menggunakan SEM PLS dan alat analisis Smart PLS. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyuluhan perikanan yang telah mengintegrasikan kebijakan pengarusutamaan gender, nyatanya belum responsif gender. Kabupaten Jepara Lokasi tersebut diidentifikasi sebagai daerah dengan persentase tertinggi laki-laki yang mudah dijangkau dalam pelaksanaan penyuluhan perikanan, yaitu 30,9% untuk program penyuluhan, 22% untuk metode penyuluhan, dan 26% untuk materi penyuluhan. Faktor yang mempengaruhi adalah nilai-nilai budaya masyarakat dan dukungan penyuluhan.

**Kata Kunci:** pesisir; penyuluhan; perikanan; gender; keberlanjutan

### ABSTRACT

Problems in the capture fisheries, aquaculture, and small-scale processing and marketing sectors indicate that the human resource capabilities of both men and women in the development process still need to be improved. This condition makes it important to have a process in place to enhance the capabilities of individuals involved in fisheries through Fisheries extension programs that consider holistic aspects. This study aims to analyze the implementation of sustainable coastal fisheries extension from a gender perspective and analyze the factors that influence it. The researcher used a quantitative and qualitative approach by collecting data through surveys and interviews on 291 small-scale fisheries actors consisting of fishermen, cultivators, processors, and marketers in Jepara Regency, Kebumen Regency, and Cilacap Regency. The data analysis using SEM PLS and Smart PLS analysis tools. The Results of the Study showed that the implementation of fisheries extension has not been equally accessible to men and women. Jepara Regency The location is identified as the area with the highest percentage of men who easily reach the implementation of fisheries extension, namely 30.9% for extension programs, 22% for extension methods, and 26% for extension materials. The influencing factors are the cultural values of the community and extension support.

**Keywords:** coastal; extension; fisheries; gender; sustainable

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Gender dan penyuluhan perikanan memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Gender menjadi konsep bermanfaat dalam memahami pembagian peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam pembangunan (Mugn iesyah 2015). Konteks gender dalam tulisan ini adalah Pengarusutamaan Gender (PUG) pada pembangunan khususnya

perikanan skala kecil. PUG dibangun sebagai strategi mengintegrasikan gender pada program pembangunan nasional, salah satunya adalah penyuluhan perikanan. PUG menekankan program yang responsif gender dengan memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat kepada para pelaku perikanan laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, penyuluhan perikanan dengan responsif gender, memiliki tujuan memberikan jaminan partisipasi penuh dan efektif, serta kesempatan yang sama antara laki-laki dan

perempuan pada pengelolaan perikanan. Melalui penyelenggaraan penyuluhan perikanan, laki-laki dan perempuan mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan berhak mendapatkan manfaat di dalamnya.

Penyuluhan perikanan memiliki peran strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Fungsi penyuluhan dalam konteks pembangunan di sektor perikanan mencakup penyebarluasan informasi, penerangan, proses belajar, perubahan sosial, rekayasa sosial, pemasaran sosial, pemberdayaan masyarakat, komunikasi pembangunan, serta perubahan perilaku yang lebih baik (Mardikanto 2011). Paradigma dalam program penyuluhan perikanan mengalami beberapa pergeseran. Peralihan pendekatan dalam penyuluhan dibangun dalam rangka pemecahan masalah. Prinsip penyuluhan pada hakikatnya selalu berusaha mencapai ideal serta senantiasa demokratis, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya pada masyarakat perikanan.

Masyarakat perikanan di Indonesia sebagian besar merupakan pelaku perikanan skala kecil yang bertempat tinggal pada wilayah pesisir (Wardono 2015). Perikanan skala kecil menjadi penyedia mata pencaharian serta penyangga ketahanan pangan bagi jutaan nelayan skala kecil dan masyarakat lokal di berbagai penjuru dunia (Bene et al. 2016; Thilsted et al. 2016). Pelaku perikanan skala kecil terdiri dari laki-laki dan perempuan yang memiliki sumber mata pencaharian dari perikanan tangkap, budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Pada tahun 2022, jumlah pelaku perikanan skala kecil atau lingkup perorangan di Indonesia berjumlah 1.646.559 pelaku usaha atau meningkat 19.2 persen dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2021 berjumlah 1.330.420 pelaku usaha. Jumlah pelaku perikanan pada tahun 2022, didominasi oleh laki-laki yaitu 83 persen atau 1.366.644 pelaku perikanan, sedangkan 17 persen atau 279.915 pelaku perikanan adalah perempuan (KKP 2022).

1. Peningkatan jumlah sumber daya manusia di sektor perikanan berimplikasi pada bertambahnya tanggung jawab penyuluh mencakup upaya untuk meningkatkan kemampuan pelaku perikanan. Meningkatnya pelaku perikanan skala kecil di sepanjang pesisir Indonesia, telah mendorong pemerintah untuk menambah jumlah penyuluh perikanan yang bertugas. Tercatat pada tahun 2022 penyuluh yang bertugas adalah sejumlah 4.753 orang, terdiri dari 2.677 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2.058 Pegawai Penyuluh Bantu

(PBB). Mereka tersebar pada sembilan lokasi Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) dan bertanggungjawab dalam pendampingan pelaku usaha pada sub sektor perikanan tangkap, budidaya, serta pengolah dan pemasar (KKP 2020). Namun demikian, peningkatan jumlah penyuluh perikanan belum mampu memenuhi pendampingan secara keseluruhan kepada para pelaku perikanan pesisir di Indonesia. Kondisi tersebut mengurangi intensitas dan kualitas pendampingan dari penyuluh kepada masyarakat perikanan. Restuwati et al. (2022) menjelaskan bahwa luasnya jangkauan wilayah kerja penyuluhan berakibat kegiatan penyuluhan perikanan berjalan tidak efektif.

2. Lebih lanjut, pemerintah berupaya agar penyuluhan perikanan dapat menuntaskan permasalahan pembangunan inklusif. Pada tingkat kebijakan, pemerintah telah mengintegrasikan tujuan SDGs ke-5 terkait dengan pengarusutamaan gender dan tujuan ke-14 mengenai pembangunan perikanan secara lestari dan berkelanjutan (Sukaniati & Khoirudin, 2017). Pada realisasinya, jika direfleksikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 yang mencapai 72.29, dapat dikatakan bahwa dampak dari rendahnya intensitas dan kualitas penyuluhan telah terjadi. Kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dipengaruhi oleh IPM laki-laki yang mencapai 76,25 melebihi IPM perempuan yaitu 69.59 (KPPA 2022). Sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2021 adalah 91,27 mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 91.06. Selanjutnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2021 sebesar 76.26. Ini menunjukkan peningkatan dibanding IDG tahun 2020 yang mencapai 75,57 (KPPA 2022). Peningkatan nilai IPG terjadi karena percepatan kenaikan IPM perempuan dibandingkan laki-laki. Akan tetapi, pencapaian pembangunan perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada konteks kesetaraan gender tingkat global, Indonesia menempati peringkat 7 dari 10 negara Filipina, Laos, Singapura, Timor Lese, Thailand, dan Vietnam (KPPA 2022). Berdasarkan hal di atas, maka pembangunan gender di Indonesia dapat dikatakan belum merata.
3. Demikian pula, upaya integrasi kebijakan pengelolaan berkelanjutan dan juga masih diwarnai dengan perilaku laki-laki dan

- perempuan pada pola penangkapan ikan dan yang menimbulkan permasalahan perikanan pesisir pada aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Jika melihat sudut pandang pembangunan perikanan berkelanjutan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir selama ini belum optimal. Sebagaimana pendapat dari Habibie (2019) yaitu Indonesia saat ini menjadi perhatian besar bagi pemerintah. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir masih dipengaruhi faktor - faktor kompleks (Hafsaridewi *et al.* (2018).
4. Pada aspek ekologi, indikasi permasalahan ditemui pada sub-sektor perikanan tangkap skala kecil di wilayah pesisir. Pesisir Kabupaten Kebumen mengalami fenomena menurunnya produksi perikanan pada komoditas unggulan bawal putih, sedangkan nelayan di pesisir Kabupaten Cilacap mayoritas mengapatkan hasil tangkapan komoditas tuna dengan ukuran yang semakin menurun. Fenomena lain adalah di wilayah pesisir Karimunjawa, telah terjadi kegiatan tangkap lebih (*overfishing*) oleh pelaku usaha baik laki-laki maupun perempuan (Widihastuti, 2021). Kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa aktivitas pelaku perikanan *overfishing* yang semakin *masif* juga terjadi hampir di seluruh wilayah perikanan Indonesia (Habibie 2018). Berdasarkan data statistik diketahui jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2018 mencapai 7.200.000 ton, atau meningkat dibandingkan tahun 2016 sekitar 4.512.191 ton (KKP 2023). Namun demikian, kenaikan produksi perikanan tangkap tersebut merupakan hasil penangkapan dari pelaku perikanan yang menggunakan armada kapal nelayan di 90 persen wilayah *fishing ground* yang telah terjadi *overfishing* (FAO 2022).
  5. Pada aspek sosial ekonomi, pelaku usaha laki-laki dan perempuan pada perikanan budi daya rumput laut masih sering menghadapi permasalahan antara lain: (1) kurangnya modal usaha; (2) penyakit *ice-ice* yang belum mampu tertangani; serta (3) faktor cuaca kerap menjadikan gagal panen rumput laut. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa gangguan penyakit dan iklim berpengaruh pada gagalnya panen rumput laut (Aprilia *et al.* 2021; Hairuddin 2022. Pada sub-sektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang sebagian besar pelaku usaha adalah perempuan, permasalahan yang muncul

adalah kurangnya pengetahuan pengolah dan pemasar hasil perikanan mengenai penerapan sanitasi *hygiene* dan *Good Manufacturing Product* (GMP). Selain itu, mereka menghadapi persoalan kurangnya informasi jaringan pemasaran, pengembangan variasi produk, akses pengetahuan dan pelatihan olahan, serta keterbatasan modal (Putri *et al.* 2019; Aprilia *et al.* 2021).

6. Bertolak pada permasalahan dan kondisi di atas, penyelenggaraan penyuluhan perikanan dinilai belum integral dan belum mengatasi sejumlah permasalahan terkait kualitas dan intensitas pendampingan penyuluh perikanan yang rendah. Kondisi tersebut menjadi faktor terbatasnya pengetahuan dan kemampuan pelaku perikanan yang merupakan elemen krusial dalam pembangunan berkelanjutan. Keterbatasan tersebut menjadi faktor dari kurang optimalnya kinerja perikanan selama ini. Menurunnya kinerja perikanan Indonesia yang didominasi oleh perikanan skala kecil salah satunya disebabkan adanya aktivitas perikanan dari sumber daya manusia di wilayah pesisir yang tidak menerapkan ilmu pengetahuan (Adam, 2013).

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah bagaimana penyelenggaraan penyuluhan perikanan pesisir dengan perspektif gender serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan penyuluhan perikanan tersebut. Wahyono (2015) berpendapat bahwa karakteristik perikanan skala kecil sebagai aktivitas yang diorganisasikan oleh lingkungan rumah tangga dan bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan. Karakteristik ini memengaruhi tingkat partisipasi pada penyuluhan (Bagus, 2019).Aspek lain yang memengaruhi tingkat partisipasi adalah nilai budaya. Nilai budaya menjadi pakem normatif yang dapat memengaruhi manusia dalam menentukan tindakan alternatif dan diwujudkan melalui bentuk norma atau aturan okal (Sari, 2015). Selanjutnya, Syufri (2005) berpendapat bahwa intensitas penyuluhan memiliki dampak pada pengambilan keputusan dari pelaku usaha dalam menghadapi masalah dari permasalahan, terutama bagi yang baru memulai usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan penyuluhan perikanan dengan perspektif gender dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyelenggaraan penyuluhan perikanan dengan perspektif gender.

## PENDEKATAN ILMIAH

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan didukung data kualitatif dengan survey eksplanasi (explanatory survey) dengan unit analisis pelaku perikanan terdiri dari nelayan, pembudidaya, dan pengolah serta pemasar yang aktif dalam kelompok perikanan. Variabel tidak terikat yang dianalisis adalah karakteristik sosial (X1), nilai budaya masyarakat (X2), serta dukungan penyuluh (X3). Sementara itu, variabel dependen yang dianalisis adalah variabel penyelenggaraan penyuluhan perikanan (Y1), perubahan perilaku (Y2), serta keberlanjutan perikanan (Y3).

Populasi penelitian adalah pelaku perikanan laki-laki dan perempuan sejumlah 291 orang. Survey dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh responden pada bulan Juli-Agustus 2024 di pesisir Kab. Jepara, Kab. Kebumen dan Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

Uji validitas dan uji reliabilitas instrumen telah dilakukan pada 30 sampel dari pelaku perikanan tangkap, budidaya, serta pengolah dan pemasar yang aktif dalam kelompok perikanan. secara acak (*random sampling*). Uji validitas instrumen diperoleh dengan *pearson product moment* hasil sembilan indikator *invalid*, sejumlah satu indikator disesuaikan dengan kondisi lapangan dan sejumlah delapan indikator dikeluarkan karena dianggap tidak relevan dengan kondisi lapangan.

Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan uji reliabilitas *Alfa Cronbach's* menunjukkan lima variabel dengan kategori reliabel. Lima variabel tersebut yaitu nilai budaya masyarakat, dukungan penyuluh, penyelenggaraan penyuluhan perikanan, perubahan perilaku, serta keberlanjutan perikanan. Uji reliabilitas digunakan dengan menggunakan alat bantu *software SPSS 19.0*.

Analisis deskriptif untuk data ordinal ditransformasikan menjadi data interval dan mengacu pada teknik *Indeks Transformasi Indikator (Indicator Transformation Index)* dengan rumus:

$$\text{Indek indikator} = \frac{\text{jumlah skor indikator yang dicapai} - \text{jumlah skor indikator minimal}}{\text{jumlah skor indikator maksimal} - \text{jumlah skor indikator minimal}} \times 100$$

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian.

Variabel	Cronbach's Alfa	Keterangan
Nilai budaya masyarakat	0.735	Tinggi
Dukungan penyuluh	0.721	Tinggi
Penyelenggaraan penyuluhan perikanan	0.779	Tinggi
Perubahan perilaku	0.785	Tinggi
Keberlanjutan perikanan	0.748	Tinggi

Sumber: Data primer 2024 (diolah).

Lebih lanjut, setiap variabel akan dihitung skornya dan dilakukan pengkategorian pada tiga tingkatan yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Untuk menjawab tujuan pertama mengenai penyelenggaraan penyuluhan perikanan digunakan analisis deskriptif dengan alat analisis SPSS sedangkan untuk menjawab tujuan kedua mengenai faktor yang memengaruhi penyelenggaraan penyuluhan perikanan digunakan analisis *Structural Equation Modelling-Partial Least Square (SEM-PLS)* dan alat analisis *Smart PLS*.

## Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan Pesisir

Penyelenggaraan penyuluhan perikanan pada wilayah pesisir menjadi bagian dari sistem penyuluhan. Menurut Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2006 sistem penyuluhan menjadi rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan serta sikap dari pelaku usaha pada bidang pertanian dan perikanan. Sistem penyuluhan khususnya pada bidang perikanan memiliki asas manfaat, keterpaduan, keseimbangan, serta keberlanjutan (UU 16, 2016). Asas manfaat dimaksudkan bahwa penyuluhan memiliki nilai manfaat untuk peningkatan pengetahuan, ketrampilan, serta perubahan perilaku pelaku usaha. Asas keterpaduan yaitu penyelenggaraan penyuluhan perikanan dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah dunia usaha, dan masyarakat. Asas keseimbangan bahwa penyelenggaraan penyuluhan perikanan harus memperhatikan kebijakan, inovasi teknologi dengan kearifan masyarakat setempat, serta pengarusutamaan gender. Terintegrasinya tujuan SDGs ke-5 mengenai pengarusutamaan gender dan tujuan ke-14 SDGs mengenai keberlanjutan pada UU No. 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan nyatanya memerlukan program penyuluhan dengan nilai manfaat bagi pengetahuan, ketrampilan, perubahan perilaku, meningkatnya produktivitas, pendapatan serta kesejahteraan pelaku usaha. Manfaat tersebut dapat diterima apabila penyelenggaraan penyuluhan perikanan mempertimbangkan program, metode, serta materi yang menyesuaikan kebutuhan pelaku perikanan. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan dapat diukur dengan indikator kesetaraan gender terhadap program, metode, dan materi penyuluhan perikanan.

**Tabel 2. Tingkat Persepsi Pelaku Perikanan Terhadap Program Penyuluhan Perikanan.**

Indikator	Kategori	Persentase (%)							
		Kep. Karimunjawa, Kab. Jepara		Kab. Kebumen		Kab. Cilacap		Total	
		n = 119		n = 95		n = 77		n = 291	
		L	P	L	P	L	P	L	P
Program Penyuluhan	Rendah	55.5	0.0	17.3	1.2	24.1	1.9	42.2	2.8
	Sedang	53.5	0.0	20.2	7.8	18.6	0.0	12.6	14.5
	Tinggi	15.9	8.7	0.0	36.3	13.0	26.1	18.9	9.1
<b>Rerata (skor)</b>		<b>44.0</b>	<b>1.4</b>	<b>41.7</b>	<b>3.5</b>	<b>17.3</b>	<b>42.4</b>	<b>44.8</b>	<b>67.3</b>
Metode Penyuluhan	Rendah	32.4	0.5	20.5	0.6	0.6	3.7	18.8	1.5
	Sedang	36.1	0.0	54.2	4.8	23.6	46.0	38.0	15.7
	Tinggi	29.4	1.5	19.9	0.0	14.9	11.2	21.9	4.0
<b>Renata (skor)</b>		<b>53.2</b>	<b>1.1</b>	<b>55.1</b>	<b>3.2</b>	<b>27.3</b>	<b>42.4</b>	<b>47.0</b>	<b>12.7</b>
Materi Penyuluhan	Rendah	39.4	0.5	42.3	2.9	32.6	8.2	41.2	60.0
	Sedang	14.7	1.1	33.6	1.5	36.8	4.1	46.0	2.1
	Tinggi	44.2	0.0	19.7	0.0	18.4	0.0	18.6	2.6
<b>Rerata (skor)</b>		<b>52.4</b>	<b>0.8</b>	<b>46.0</b>	<b>2.1</b>	<b>18.6</b>	<b>2.6</b>	<b>41.3</b>	<b>1.7</b>

Sumber: Data Primer, 2024 (Diolah).

Ket: Skor: (0-33.3: rendah); (3.34-66.7: sedang); (66.8-100: tinggi)

Indikator program penyuluhan perikanan dianalisis dari kesetaraan pada aspek akses pelaku usaha terhadap penyuluhan perikanan, partisipasi pelaku usaha terhadap program penyuluhan perikanan, kontrol pelaku usaha terhadap program penyuluhan perikanan serta manfaat yang diterima pelaku perikanan di Kep. Karimunjawa,

Kab. Jepara, Kab. Kebumen, serta Kab. Cilacap. Indikator metode dapat diukur dari pemilihan jenis metode yang tepat menurut responden, sedangkan indikator materi penyuluhan perikanan diukur dari tingkat akses, partisipasi, kontrol dan manfaat terhadap penyajian materi penyuluhan.

**Tabel 3. Tingkat Persepsi Pelaku Perikanan Terhadap Program Penyuluhan Perikanan.**

Indikator	Kategori	Persentase (%)							
		Kep. Karimunjawa, Kab. Jepara		Kab. Kebumen		Kab. Cilacap		Total	
		n = 119		n = 95		n = 77		n = 291	
		L	P	L	P	L	P	L	P
Akses	Rendah	43.6	0.6	4.1	0.5	24.7	34.0	22.8	7.7
	Sedang	54.6	1.2	72.6	4.1	8.3	33.0	52.3	9.2
	Tinggi	0.0	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0
	<b>Rerata (tahun)</b>	<b>45.4</b>	<b>0.8</b>	<b>64.6</b>	<b>3.2</b>	<b>13.8</b>	<b>28.1</b>	<b>43.3</b>	<b>8.8</b>
Partisipasi	Rendah	53.3	0.0	51.9	0.0	12.5	2.5	38.6	0.9
	Sedang	18.2	1.2	21.4	6.1	2.5	26.3	13.6	11.4
	Tinggi	25.5	1.8	18.3	2.3	11.3	45.0	18.4	17.1
	<b>Rerata (tahun)</b>	<b>44.8</b>	<b>1.4</b>	<b>42.1</b>	<b>3.9</b>	<b>18.2</b>	<b>51.1</b>	<b>36.9</b>	<b>15.4</b>
Kontrol	Rendah	55.6	0.6	51.5	0.8	18.8	7.1	45.4	7.1
	Sedang	16.3	1.3	23.1	6.2	14.3	11.7	14.3	11.7
	Tinggi	26.3	0.0	18.5	0.0	21.4	0.0	21.4	0.0
	<b>Rerata (kali)</b>	<b>44.0</b>	<b>0.8</b>	<b>42.4</b>	<b>3.2</b>	<b>17.3</b>	<b>33.3</b>	<b>36.4</b>	<b>8.5</b>
Manfaat	Rendah	68.0	0.7	72.5	0.0	2.2	5.0	48.8	2.6
	Sedang	0.0	1.3	5.5	0.0	5.6	22.2	4.2	11.1
	Tinggi	30.0	0.0	22.2	0.0	31.7	33.3	33.3	0.0
	<b>Rerata (tahun)</b>	<b>41.1</b>	<b>0.8</b>	<b>38.2</b>	<b>0.0</b>	<b>30.7</b>	<b>47.2</b>	<b>37.4</b>	<b>6.0</b>

Sumber: Data Primer, 2024 (Diolah)

Ket: Skor: (0-33.3: rendah); (3.34-66.7: sedang); (66.8-100: tinggi)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat akses program penyuluhan perikanan di Kab. Kebumen lebih tinggi yaitu 64.6% untuk laki-laki dan 3.2% untuk perempuan. Tingkat akses rendah terdapat pada Kep. Karimunjawa yaitu 45.4% untuk laki-laki dan 0.8% untuk perempuan, dan disusul Kab. Cilacap yaitu 13.8% untuk laki-laki dan 26.1% untuk perempuan. Tingkat partisipasi tertinggi terdapat pada Kab. Cilacap yaitu untuk perempuan 51.1% dan laki-laki 18.2%. Selanjutnya tingkat partisipasi pada Kep. Karimunjawa adalah 44.8% untuk laki-laki dan 1.4% untuk perempuan, sedangkan untuk laki-laki adalah sebesar 42.1% dan 3.9% untuk perempuan. Tingkat kontrol pada Kep. Karimunjawa lebih tinggi dengan 44% laki-laki dan 0.8 untuk perempuan, dibandingkan dengan tingkat kontrol pada Kab. Kebumen yaitu 42.4% dan 3.2% dibandingkan dengan Kab. Cilacap yaitu 33.3% untuk perempuan dan 17.3% untuk laki-laki. Lebih lanjut pada tingkat manfaat yang memiliki presentase tertinggi terdapat pada responden di Kab. Cilacap dengan 47.3% dan 30.7% untuk laki-laki, sedangkan untuk Kep. Karimunjawa 41.1% untuk laki-laki dan 0.8% untuk perempuan. Kabupaten Kebumen 38.2% untuk laki-laki dan 0.0% untuk perempuan. Berdasarkan persentase tingkat akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pada ketiga lokasi dapat digambarkan bahwa pada penyelenggaraan penyuluhan di tiga lokasi belum responsif gender. Hal tersebut digambarkan dengan laki-laki lebih dominan dalam mengakses, berpartisipasi, melakukan kontrol dan menerima manfaat program penyuluhan perikanan dibanding dengan perempuan.

Pada sektor perikanan tangkap di ketiga lokasi digambarkan dengan laki-laki yang lebih dominan dalam mengakses, berpartisipasi pada sosialisasi penerimaan bantuan seperti bantuan kapal, alat tangkap ramah lingkungan, asuransi nelayan, informasi mengenai kebijakan perikanan, serta melakukan kontrol dengan mengeluarkan pendapat ketika dilakukan pertemuan. Kemudahan tersebut berbuah hasil terhadap kemudahan responden dalam meningkatkan pendapatannya. Namun demikian rendahnya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diterima oleh perempuan menimbulkan permasalahan sosial. Akibat rendahnya informasi dan pengetahuan seperti kebijakan perikanan, maka perempuan membantu suaminya melaut tanpa memperhatikan pentingnya kelestarian sumber daya perikanan. Kondisi tersebut berdampak pada permasalahan seperti penurunan produksi komoditas unggulan seperti di Kep. Karimunjawa, Kab. Jepara yaitu teripang pasir, serta komoditas bawal putih di Kab. Kebumen dan Kab. Cilacap. Selanjutnya terjadi

pembuangan sampah kegiatan menangkap ikan di laut yang kerap dilakukan nelayan di Kab. Cilacap.

Kebijakan penyuluhan perikanan yang telah memasukan pertimbangan gender memiliki persepsi yang belum berubah, Istilah gender hanya diimplikasikan dalam bentuk jenis kelamin dan belum dalam bentuk kesetaraan melalui kerjasama untuk mengatasi akar penyebab permasalahan, oleh karenanya diperlukan perubahan persepsi terhadap pentingnya kesetaraan gender. Kondisi tersebut mendukung pendapat dari (Mukhopadhyay 2007) mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan jangka panjang.

Metode penyuluhan perikanan yang diterapkan pada proses pendampingan pada responden meliputi metode sekolah lapang, metode kunjungan lapang, metode pameran serta metode pembagian broshur/leaflet, atau juknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah 51.2 persen metode sekolah lapang lebih mudah diikuti oleh responden di tiga lokasi. Responden di Kep. Karimunjawa Kab. Jepara sejumlah 29.4% lebih mudah paham mengikuti penyuluhan dengan metode sekolah lapang. Demikian juga pada responden di Kab. Kebumen dengan jumlah 53.7% dan 81.8% untuk responden di Kab. Cilacap. Sekolah lapang lebih mudah dipahami oleh laki-laki dan perempuan di tiga lokasi. Sekolah lapang dapat memberikan kesempatan kepada responden dengan memperhatikan penjelasan langsung dari penyuluh, disertai dengan praktek dan bertanya langsung ketika belum memahami. Antara responden dengan penyuluh perikanan dapat terjadi proses interaksi sosial yang dapat memperbanyak informasi yang diperoleh. Hal tersebut mendukung pendapat dari Silaban, dkk (2024) bahwa bagi petani merasa lebih tertarik dan mudah memahami ketika mengikuti penyuluhan dengan metode sekolah lapang. Penggunaan video, permainan edukatif, dan demonstrasi lapangan dapat meningkatkan daya tarik peserta belajar. Proses komunikasi merupakan proses berpindahnya pesan sampai dengan pesan tersebut diterima, dimengerti, timbul kesadaran, timbul minat, menimbang dan mencoba untuk menerapkannya atas kesadaran sendiri (Rahman, 2021).

Pada aspek materi penyuluhan perikanan diukur dengan sub indikator materi penyuluhan yang diberikan kepada responden adalah materi peraturan larangan penangkapan ikan pada zona inti, pencegahan pencemaran lingkungan, alat tangkap ramah lingkungan pada bidang perikanan tangkap. Materi terkait perikanan budidaya meliputi informasi penanganan penyakit ice-ice, pencegahan gagal panen rumput laut, penanganan gagal panen

rumput laut, cara penjemuran yang baik. Sedangkan materi yang diberikan terkait pengolahan perikanan adalah teknologi ramah lingkungan, Cara pengolahan Ikan yang Baik (CBIB), diversifikasi pengolahan ikan, serta pencegahan pencemaran perairan laut. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar materi diterima oleh laki-laki saja terjadi pada responden di Kab. Jepara sejumlah 63.9% dan responden di Kab. Kebumen sejumlah 65.3%. Mayoritas responden di Kab. Cilacap yang menerima materi penyuluhan adalah perempuan pengolah dan pemasar dengan jumlah 53.0%. Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa materi penyuluhan akan lebih banyak diterima oleh peserta belajar apabila materi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang mendukung pertumbuhan usaha perikanan bagi pelaku perikanan skala kecil. Materi penyuluhan yang responsif gender menentukan hasil sesuai rencana karena laki-laki dan perempuan telah memenuhi kebutuhan pengetahuan yang dibutuhkan (Puspita *et al.*, 2014).

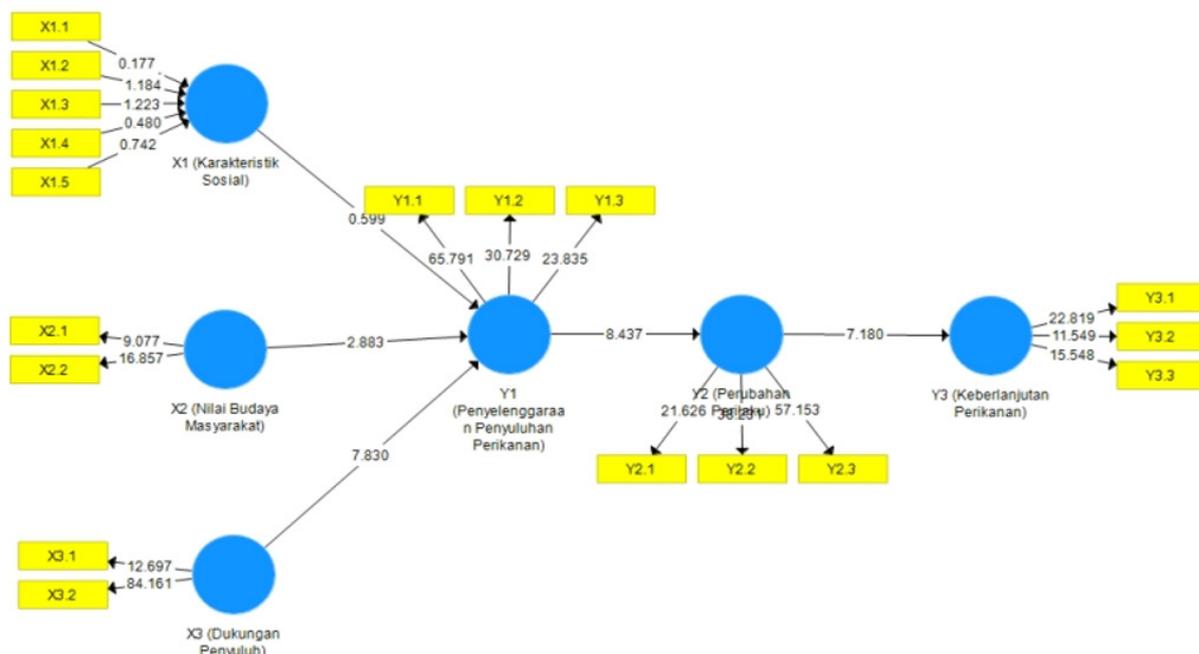
### Pengaruh antar Variabel (Analisis Model SEM-Partial Least Square)

Penelitian ini melakukan pengujian hipotesis yang diajukan dengan melihat *path coefficient* yang menunjukkan koefisien parameter dan nilai signifikansi t statistik. Signifikansi parameter yang diestimasi dapat memberikan informasi mengenai hubungan antar variabel-variabel penelitian. Batas untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan yaitu menggunakan probabilitas 0.05 (Haryono, 2017).

Nilai budaya masyarakat dan dukungan penyuluhan memiliki pengaruh nyata pada penyelenggaraan penyuluhan perikanan. Hasil *output Path Coefisient* yang didapat nilai T value  $T \text{ value} > 1,96$  ( $2,883 > 1,96$ ) atau *P values*  $< 0,05$  ( $0,004 < 0,05$ ), dengan demikian nilai budaya masyarakat memiliki pengaruh yang positif terhadap penyelenggaraan penyuluhan perikanan. Nilai budaya menurut Sari (2015) adalah nilai yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Nilai budaya terdiri dari empat hubungan yaitu hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan dirinya sendiri, serta manusia dengan dengan Tuhan (Darazah SSF, *et al.*, 2022). Pada penelitian ini, variabel nilai budaya masyarakat diukur melalui indikator relasi gender dan kearifan lokal.

Relasi gender sangat menentukan keterlibatan responden di tiga lokasi penelitian terhadap penyelenggaraan penyuluhan perikanan. Pada relasi gender terbentuk kesepakatan antara laki-laki dan perempuan yang menentukan tindakan selanjutnya. Lebih lanjut, pelaku perikanan skala kecil pada pesisir di Kep. Karimunjawa, Kab. Jepara, Kab. Kebumen, dan Kab. Cilacap memiliki prinsip kepatuhan dalam hubungan rumah tangga. Hubungan manusia dengan manusia dapat dilakukan oleh rumah tangga melalui bentuk relasi gender (Mugniesyah 2015).

Indikator nilai kearifan lokal berupa hubungan manusia dengan alam dapat diimplikasikan melalui bentuk kepatuhan laki-laki dan perempuan terhadap aturan lokal pada pengelolaan sumber



Gambar 1. Evaluasi Inner Model Penyuluhan Perikanan Pesisir Dengan Perspektif Gender.

daya perikanan. Hubungan manusia dengan Tuhan dapat diimplikasikan melalui bentuk nilai kearifan lokal, dan selanjutnya adalah hubungan manusia dengan diri sendiri adalah dalam bentuk kegigihan atau usaha yang terus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dari usaha perikanan. Nilai budaya pada dasarnya menjadi pakem normatif yang memengaruhi manusia dalam menentukan tindakan alternatif dan diwujudkan melalui bentuk norma atau aturan lokal (Sari, 2015).

Dukungan penyuluh perikanan memiliki pengaruh positif terhadap keterlibatan penyelenggaraan penyuluhan perikanan. Hasil output *Path Coefficient* diperoleh nilai T value > 1,96 (7,830 > 1,96) atau P values < 0,05 (0,000 < 0,05), yang artinya dukungan penyuluhan memiliki pengaruh positif terhadap keterlibatan responden pada penyelenggaraan penyuluhan perikanan. Dukungan penyuluh yang terdiri dari frekuensi penyuluh dan kapasitas penyuluh sangat menentukan keterlibatan responden pada penyelenggaraan penyuluhan perikanan. Frekuensi penyuluh ketika berkomunikasi dengan responden melalui kegiatan seperti sosialisasi, dan pendampingan berdampak positif terhadap pengambilan keputusan dari responden. Selanjutnya, kompetensi penyuluh merupakan kemampuan penyuluh dalam menjalankan tugasnya terhadap pelaku perikanan. Yusneli et al. (2022) menjelaskan bahwa kompetensi penyuluh meliputi (1) kemampuan komunikasi terkait inovasi; (2) manajemen pembelajaran; (3) manajemen pembaruan kemampuan; (4) manajemen pelatihan; (5) pengarahan pada sistem jejaring; (7) pemahaman potensi wilayah.

## PENUTUP

Nilai budaya masyarakat dan dukungan penyuluh merupakan faktor kunci dalam menentukan keterlibatan pelaku perikanan dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan. Nilai budaya masyarakat dan dukungan penyuluh secara signifikan berpengaruh secara nyata pada keterlibatan penyelenggaraan penyuluhan perikanan.

Penyelenggaraan penyuluhan perikanan yang responsif gender dapat mendukung program pembangunan perikanan. Penyuluhan perikanan yang mudah diakses baik oleh laki-laki dan perempuan, memberikan peluang yang besar adanya partisipasi dan kontrol laki-laki dan perempuan untuk pembangunan. Metode penyuluhan sekolah lapang dengan materi yang sesuai kebutuhan, menjadi salah satu strategi efektif tumbuhnya perilaku perikanan yang mendukung pembangunan perikanan berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Anna Fatchiya, M.Si, Prof. Dr. Ir. Pudji Muljono, M.S., dan Dr. Ir. Syahyuti, M.Si sebagai jajaran komisi pembimbing dan tim penulisan jurnal dari riset yang berjudul penyuluhan perikanan pesisir berkelanjutan dengan perspektif gender.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi masing-masing penulis dalam penulisan makalah ini adalah: Retno Widiastuti, S.Sos., M.Kesos, Prof. Dr. Anna Fatchiya, M.Si, Prof. Dr. Ir. Pudji Muljono, dan Dr. Ir. Syahyuti, M.Si sebagai sebagai kontributor/anggota utama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L & Surya. T.A. 2013. Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia. P3DI Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Jakarta. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. 4(2) :195-211.
- Aprilia ED, Nurfitriana N, Yuniarti T. 2021. Analisis Permasalahan Usaha Perikanan di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*. 15(2):207-226. doi:10.33378/jppik.v15i2.254.
- Béné C, Arthur R, Norbury H, Allison EH, Beveridge M, Bush S, Williams M. 2016. Contribution of Fisheries and Aquaculture to Food Security and Poverty Reduction : Assessing the Current Evidence. *World Dev*. 79:177-196. doi:10.1016/j.worlddev.2015.11.007.
- Darazah, S.S.F, Fitrah Y, Dewi Y. 2022. Nilai budaya legenda bukit perak sebagai bahan ajar bahasa indonesia kelas X. *Jurnal Bahasa Indonesia Prima*.4(1).2022: 200-207.
- FAO. 2022. The Status Of Fishery Resources. *State World Fish Aquac 2022*. [https://www.fao.org/3/cc0461en/online/sofia/2022/status/of\\_fishery\\_resources](https://www.fao.org/3/cc0461en/online/sofia/2022/status/of_fishery_resources).
- Hafsaridewi R, Khairuddin B, Ninef J, Rahadiati A, Adimu HE. 2019. Pendekatan Sistem Sosial – Ekologi Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu. *Buletin Ilmiah Maritim Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 4(2):61-74. doi:10.15578/marina.v4i2.7389.
- Hairuddin, S. 2022. Faktor yang memengaruhi gagal panen petani rumput laut di desa Senga Selatan Kecamatan Belopa.
- Haryono, Siswoyo, 2017, “Metode SEM Untuk Penelitian Manajemen dengan AMOS Lisrel PLS”. Cetakan I. Penerbit Luxima Metro Media. Jakarta. Hal: 405, 375, 421, 410, 255.

- KPPA.2022. Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.Jakarta (ID).
- KKP.2020. Programa Penyuluhan Perikanan Nasional Tahun 2020.KKP Jakarta (ID).
- KKP.2022. Data Pusat Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan. KKP. Jakarta (ID).
- Mardikanto T. 2011. Sistem Penyuluhan Pertanian. Surakarta: Fak. Pertanian, Universitas Sebelas Maret.
- Mugniesyah. 2007. Gender, Lingkungan dan Pembangunan. [Internet]. [diunduh pada: 28 Januari 2020]. Tersedia pada <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/76150>.
- Mukhopadhyay M. 2016. Mainstreaming gender or “streaming” gender away: Feminists marooned in the development business. *IDS Bull.* 35(4):95–103. doi:10.1111/j.1759-5436.2004.tb00161.x.
- Putri JA, Yuniarti T, Dewi IJP.2019. Analisa Permasalahan Penyuluhan Perikanan di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka.*Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan.*13(2):149-168. doi:10.33378/jppik.
- Rahman, A. 2021. Tantangan dan Peluang Penyuluh Agama di Era Digital. *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan*,25(1),102–115. <https://doi.org/10.15408/dakwah.v25i1.23185>.
- Restuwati I, Arimukti KD, Anggoto W. 2022. Analisis Potensi dan Permasalahan Perikanan di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Penyuluhan dan Kelautan.*16(3)221-243.
- Sari DF. 2015.Kearifna Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Aie Lunang Di Kenagarian Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.*Jurnal Spasial: Penelitian Terapan Ilmu dan Geografi.*32-41.
- Silaban, DI, Riang Y, Bataona MR, Menda V, Bajo A. 2020. Optimalisasi Komunikasi Penyuluhan Pertanian Dalam Sekolah Lapang Iklim Stasiun Klimatologi Kupang: *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 23 (1)121-131.
- Sukarniati L dan Khoirudin R.2017.Analisis Kelembagaan Penerapan Konsep Blue Economy Pada Tambak Udang (Studi Kasus Di Dusun Ngentak Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul), *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2).
- Thilsted SH, Thorne-Lyman A, Webb P, Bogard JR, Subasinghe R, Phillips MJ, Allison EH. 2016. Sustaining healthy diets: The role of capture fisheries and aquaculture for improving nutrition in the post-2015 era. *Food Policy.* 61:126–131. doi:10.1016/j.foodpol.2016.02.005.
- Widihastuti R. 2022. Peran Sosial Ekonomi (Sosek) Dan kelembagaan Dalam Riset Pemulihan Sumber daya Teripang Pasir di Desa Kemujan Kec. Karimunjawa, Kab, Jepara, Prov, Jawa Tengah. *Laporan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.*2024.
- Wardono, B., Fauzi, A., Fahrudin, A., & Purnomo, A. H. 2015. Total faktor produktivitas dan indeks instabilitas perikanan tangkap: kasus di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.*10 (2) 35-46.
- Yusneli S, Tanjung HB. 2022. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi penyuluh pertanian di Kabupaten Pasaman.*Jurnal Niara.*14(2):26-34.